

Penundaan SPI Bisa Pengaruhi Harga Bawang Putih

Tanggal : Selasa , 06 Oktober 2020
Media : Sindonews.com
Halaman : 1
Wartawan : (Rakhmat Baihaqi/Ant)
Muatan Berita : Netral
Narasumber : Didi S Perdaganganumedi (Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan)
Rubrik : EKBIS
Topik : Bawang Putih

Penundaan SPI Bisa Pengaruhi Harga Bawang Putih

Koran SINDO

Selasa, 06 Oktober 2020 - 10:13 WIB



Foto: S

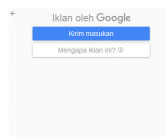
Am N

JAKARTA - Penundaan penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih dinilai perlu diurut. Pasalnya, penundaan tersebut diduga bisa memengaruhi harga bawang putih di pasaran.

"Usut jika memang ada kesengajaan menunda impor bawang putih dengan tujuan menaikkan harga," ujar peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah di Jakarta kemarin. **(Baca: Hidayah Adalah Mengetahui Kebenaran)**

Saat ini harga bawang putih di pasaran mulai merangkak naik mencapai Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, importir mengeluhkan Surat Persetujuan Impor (SPI) mereka tidak kunjung dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Rusli mengatakan, pemerintah melalui Kemendag harus segera menerbitkan SPI bawang putih guna menekan harga di pasaran.



Baca Juga:

Kisruh Impor Bawang Putih, DPR Akan Telusuri Penerbitan SPI

Suapaya Tak Ada Salah-salah Kisruh Bawang Putih, DPR Akan Panggil Dua Menteri

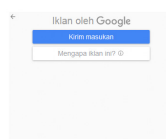
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menuturkan, keluhan dari sejumlah importir soal SPI bukan hal baru karena adanya indikasi ongkos politik.

"Itu bertela lama. Kalau belum diberesin importir-importir yang harus bayar biaya-biaya politik, ya akan terus begini sampai kapan pun. Itu sudah biasa apalagi kalau jelang pilkada, pemilu. Kan politik gitu. Kalau tidak diambil tindakan, ya akan begitu terus. Kalau diambil tindakan, tidak ada biaya politik," tuturnya. **(Baca juga: Masa Pendaftaran Beasiswa Unggulan Ditutup Hari Ini)**

Agus menegaskan, kebiasaan ini sangat mengganggu ekonomi dan

korupsi **Bursa Finansial** **Sektor Rili** **Infeksi**

Kalau 1 kilo 1 perak (rupiah) saja, berapa yang masuk?" katanya.



Dia menegaskan impor bisa dilakukan saat kebutuhannya kritis, terlebih bawang putih termasuk komoditas yang harus diimpor dan berpotensi banyak barang ilegal. "Pesaannya 10 ton, datangnya 50 ton. Biasa itu, bukan hal aneh. Apalagi kalau mau dekat-dekat pilkada, dekat-dekat pemilu. Karena biaya politik paling mudah, ya dari masukin barang, semua orang tahu bukan barang aneh," paparnya.